

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang diuraikan peneliti di atas dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Kebijakan pemeriksaan tematik yang menilai agenda pembangunan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan dituangkan ke dalam RPJMN perlu dilaksanakan karena BPK merupakan satu-satunya auditor eksternal pemerintah yang dapat melaksanakan pemeriksaan ini. Model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif terpilih menjadi model kebijakan pemeriksaan tematik yang paling tepat untuk saat ini. Dengan penerapan model kebijakan tersebut, keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh BPK terkait dengan sumber daya manusia dan anggaran dapat diselesaikan dengan menerapkan strategi pemeriksaan *project based audit* yang disesuaikan dengan portofolio masing-masing unit kerja pemeriksaan. Sedangkan kelemahan dalam *project based audit* dimana fokus audit per tahunnya berubah, dapat di atasi dengan melakukan audit tindak lanjut (*follow-up audit*) namun harus direncanakan dengan baik agar dapat mencukupi secara waktu dan sumber daya baik manusia maupun anggaran. Pemeriksaan/audit yang dilaksanakan selalu berpegang pada pendekatan *risk based audit* untuk jenis pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan jenis pemeriksaan kinerja pada tahapan awal akan dilakukan penilaian/pembobotan terhadap program/kegiatan atas entitas yang diperiksa melalui metodologi RIAS (*risk, impact, auditability, significant*), di mana objek pemeriksaan yang akan diambil ditentukan oleh risiko-risiko yang dideteksi baik dari pemeriksaan sebelumnya maupun informasi yang beredar di masyarakat. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat antara seluruh unit kerja pemeriksaan di BPK untuk dapat mendukung kebijakan pemeriksaan kolaboratif yang ditetapkan supaya mencapai tujuan.

Kelemahan dari model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif ini yaitu jika terdapat satu saja unit kerja yang tidak berjalan dan tidak mendukung kebijakan

akan berdampak pada kesimpulan atas penilaian terhadap agenda pembangunan nasional.

B. Saran

1. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja di BPK dapat menerapkan kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif dengan penguatan dari sisi perencanaan. Perencanaan dimulai dengan melakukan identifikasi klien utama BPK pada tugas dan fungsi serta hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Kemudian menetapkan kriteria kebijakan yang tepat dan dapat diterapkan mulai dari strategi pemeriksaan, pendekatan sampling, teknis dan mekanisme pelibatan unit kerja pemeriksaan, penetapan prosedur kesimpulan, dan penetapan pelaksanaan *follow-up audit*. Mekanisme pengenalan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan internalisasi juga dibuat pada saat perencanaan model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif ini.
2. Diperlukan perencanaan yang matang untuk dapat menetapkan sebuah kebijakan yang akan diterapkan dan menyasar ke banyak personil di BPK; sistem yang mendukung termasuk bagaimana pengaturan dan pembuatan pedoman yang mendukung dari perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam rangka menyukseskan sebuah kebijakan; sosialisasi yang intensif diperlukan supaya seluruh pelaksana kebijakan dapat memahami tujuan diterapkannya sebuah kebijakan dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan pemahaman yang penuh; dan harus jelas pembagian tugas antara seluruh unit pelaksana tugas baik penunjang maupun pemeriksaan untuk dapat menerapkan sebuah kebijakan baru.
3. Penelitian terkait dengan kebijakan pemeriksaan tematik agenda pembangunan nasional yang menghasilkan model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif ini masih memiliki keterbatasan dalam menguraikan lebih lanjut terkait dengan metodologi penarikan kesimpulan pada ikhtisar hasil pemeriksaan. Penarikan kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk

memberikan penilaian pada satu fokus pemeriksaan, misalnya pada prioritas nasional tertentu dari hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan pada beberapa entitas pemeriksaan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan metodologi penarikan kesimpulan untuk dapat melengkapi penelitian ini.

Selain itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kolaborasi yang terjadi di dalam internal organisasi yang memiliki banyak unit kerja dengan tanggung jawab yang berbeda-beda.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S., & Mulyanto, D. (2019). *Isu-Isu Pembangunan Pengantar Teoritis*. PT Gramedia Jakarta.
- Adams, M. B. (1994). Agency Theory and the Internal Audit. *Managerial Auditing Journal*, 9(8), 8–12.
- Baimyrzaeva, M., & Kose, H. O. (2014). The Role of Supreme Audit Institutions In Improving Citizen Participation In Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 15, 77–90.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. www.bpk.go.id.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Juklak Pemeriksaan Kinerja*. www.bpk.go.id.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021*. www.ihps.bpk.go.id.
- Barman, K. (2009). *Leadership Management Achieving Breakthroughs*. Global India Publications PVT LTD New Delhi.
- Church, B. K., Davis, S. M., & Mccracken, S. A. (2008). The Auditor's reporting model. *Accounting Horizon*, 22(1), 69–90.
- Cordo, G.-S., & Fülöp, M.-T. (2015). Understanding audit reporting changes : introduction of Key Audit Matters. *Accounting and Management Information Systems*, 14(1), 128–152.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Vicky Knight.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (M. Darwin (ed.)). Gadjah Mada University Press.
- Goicoechea, E., Gómez-Bezares, F., & Ugarte, J. V. (2021). Improving audit reports: A consensus between auditors and users. *International Journal of Financial Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.3390/ijfs9020025>
- International Organisation of Supreme Audit Institutions. (2019). *ISSAI 3000: Performance Audit Standard*. www.issai.org
- INTOSAI Development Initiative. (2020). *IDI's SDGs Audit Model/ISAM*. <https://www.idi.no>
- Martiana, N. (2018). Badan Pemeriksa Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 3(2), 1–10.
- McNamara, M. (2012). Starting to Untangle the Web of Cooperation,

- Coordination, and Collaboration: A Framework for Public Managers. *International Journal of Public Administration*, 35:6, 389-401
- Nugroho, R. (2018). Public Policy 6 Edisi Revisi (Y. Masda (ed.)). PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2015). *Policy Making*. PT Elex Media Komputindo.
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2015). Basic methods of policy analysis and planning. In *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. <https://doi.org/10.4324/9781315664736>
- Praptitorini, M. D., & Januarti, I. (2011). Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default Dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Going Concern. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(1), 78–93. <https://doi.org/10.21002/jaki.2011.05>
- Prasetyawati, N. (2018). Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 53. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421>
- Putra, F., & Sanusi, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme Teori dan Praktik*. LP3ES.
- Rajaguguk, B. W., Yatnaputra, I. G. B. T., & Paulus, A. (2017). Preparing Supreme Audit Institutions for Sustainable Development Goals. *International Journal of Government Auditing*. <https://doi.org/10.4324/9781003117087-19>
- Sarjono, S. (2015). Reposisi Peranan Pemeriksaan/Audit Dalam Mengawasi Program Pemerintah. *Liquidity*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.32546/lq.v4i1.75>
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2017a). *Metode Penelitian untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2017b). *Metode Penelitian untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sendjaja, D. W., Rismanto, G. Y., & Andrianto, N. (2015). Analisis Kebijakan Publik Dalam Pemeriksaan Kinerja. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 67–81. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.20>
- Setijaningrum, E. (2017). *Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik Best Practise di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Shows, D. W. (2014). *Examining the State of The Field and Possibilities for Collaboration in Organization Development*. ProQuest LLC.
- Suartama, I. K., Nurdin, S., & Susilo, F. S. (2015). Enhancing BPK RI'S Audit Design for People's Welfare: A Practical Approach. *Jurnal Tata Kelola Dan*

Akuntabilitas Keuangan Negara, 1(2), 173–190.

Verma, D (2009). *Decisions-Making Style Social and Creative Dimentions*. Global India Publications PVT LTD New Delhi.

Wibisono, W., Salomo, R. V, & Wijaya, C. (2021). Towards a Mutualism Performance Audit on Local Governments Between Auditor and Community. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji*, 3(1), 539–548.

Wooten, T. C., & Colson, R. H. (2003). Research About Audit Quality. *CPA Journal*, 73(1), 48.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=8947806&site=ehost-live>

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Laporan:

Laporan Monitoring Pemeriksaan Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021

Laporan Kegiatan Diskusi dengan BAKN DPR RI Pendalaman IHPS II Tahun 2021 atas LHP BUMN dan Badan Lainnya 1 Juli 2022

Website:

<https://oag.parliament.nz> website of Office Auditor General New Zealand (OAG NZ)

<https://www.gao.gov> website of U.S. Government Accountability Office (GAO)

<https://www.anao.gov.au> website of Australian National Audit Office (ANAO)

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Utama kepada *Key Informan*

No	<i>Key Informan</i>	Daftar Pertanyaan Utama
1.	Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR	<p>a. Sejak Tahun 2021, BPK melakukan pemeriksaan strategis yang fokusnya diselaraskan dengan agenda pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dan telah disajikan pertama kali dalam buku IHPS II Tahun 2021. Apakah BAKN sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) terbantu dalam hal melaksanakan fungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan?</p> <p>b. Apakah BAKN dapat memahami substansi penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK?</p> <p>c. Apakah BAKN menemui kesulitan dalam hal memahami ikhtisar hasil pemeriksaan BPK yang menilai program/kegiatan pemerintah dalam satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024?</p> <p>d. Apa harapan BAKN terkait dengan penyajian hasil pemeriksaan BPK terhadap agenda pembangunan nasional?</p> <p>e. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPK (baik SDM maupun anggaran) yang berpengaruh terhadap cakupan pemeriksaan agenda pembangunan nasional, menurut BAKN hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh BPK dalam menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaannya supaya memadai dan berdampak terhadap para <i>stakeholders</i>?</p> <p>f. Menurut BAKN, adakah alternatif lain dalam hal model penyajian IHPS atas hasil pemeriksaan agenda pembangunan nasional yang lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan?</p> <p>g. Bagaimana penyajian hasil pemeriksaan BPK, yang menurut BAKN dapat menggambarkan kinerja pemerintah dalam satu prioritas nasional?</p>
2.	Anggota DPR	<p>a. Dalam upaya untuk mendorong evaluasi dan peningkatan program pembangunan pemerintah, BPK melakukan pemeriksaan strategis yang</p>

No	Key Informan	Daftar Pertanyaan Utama
		<p>fokusnya diselaraskan dengan agenda pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Menurut DPR apakah fokus pemeriksaan BPK ini sudah tepat?</p> <p>b. Menurut DPR apakah penuangan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam buku IHPS cukup mudah dipahami dan membantu DPR dalam menjalankan fungsinya?</p> <p>c. Sejauh mana DPR menggunakan hasil-hasil pemeriksaan BPK?</p> <p>d. Apa harapan Anda sebagai anggota dewan terkait dengan penyajian hasil pemeriksaan BPK terhadap agenda pembangunan nasional?</p> <p>e. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPK (baik SDM maupun anggaran) yang berpengaruh terhadap cakupan pemeriksaan agenda pembangunan nasional, menurut Anda sebagai anggota dewan, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh BPK dalam menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaannya supaya memadai dan berdampak terhadap para <i>stakeholders</i>?</p> <p>f. Menurut Anda sebagai anggota dewan, adakah alternatif lain dalam hal model penyajian IHPS atas hasil pemeriksaan agenda pembangunan nasional yang lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan?</p> <p>g. Bagaimana penyajian hasil pemeriksaan BPK, yang menurut DPR dapat menggambarkan kinerja pemerintah dalam satu prioritas nasional?</p>
3.	Bappenas	<p>a. BPK membuat kebijakan pemeriksaan untuk tahun 2020-2024 yang diselaraskan dengan agenda pembangunan dalam RPJMN. Bagaimana tanggapan Bappenas dalam hal ini?</p> <p>b. Bappenas sebagai pihak yang memiliki tugas utama dalam merencanakan pembangunan nasional, juga memiliki tugas dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Menurut Bappenas, apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap agenda pembangunan dan dituangkan dalam IHPS membantu Bappenas dalam melakukan evaluasi tersebut?</p> <p>c. Apakah posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga audit eksternal pemerintah cukup strategis dalam memfokuskan pemeriksaan pada agenda</p>

No	Key Informan	Daftar Pertanyaan Utama
		<p>pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini?</p> <p>d. Menurut Bappenas, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPK (baik SDM maupun anggaran), apakah BPK tetap dapat menyajikan ikhtisar hasil pemeriksaan dalam satu prioritas nasional secara memadai dan berdampak?</p> <p>e. Apa syarat/kriteria yang harus dimiliki oleh BPK menurut Bappenas, supaya BPK dapat memberikan penilaian yang handal dan memadai dengan keterbatasan yang dimiliki?</p> <p>f. Menurut Bappenas, adakah alternatif lain dalam hal model penyajian IHPS atas hasil pemeriksaan agenda pembangunan nasional yang lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan?</p> <p>g. Bagaimana penyajian hasil pemeriksaan BPK, yang menurut Bappenas dapat menggambarkan kinerja pemerintah dalam satu prioritas nasional?</p>
4.	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)/organisasi profesi akuntan	<p>a. Dalam upaya untuk mendorong evaluasi dan peningkatan program pembangunan pemerintah, saat ini BPK melakukan pemeriksaan strategis yang fokusnya diselaraskan dengan agenda pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, bagaimana pendapat IAI terkait hal ini?</p> <p>b. Cakupan pemeriksaan di BPK untuk pemeriksaan pada satu agenda pembangunan/prioritas nasional terbatas, menurut IAI apakah ini akan berpengaruh kepada penilaian BPK terhadap agenda pembangunan pemerintah?</p> <p>c. Bagaimanakah model penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan yang menurut IAI tepat sebagai masukan perbaikan bagi pelaksanaan agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah?</p> <p>d. Dengan model penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan strategis yang saat ini dibuat oleh BPK yang tertuang pertama kali di dalam buku IHPS II 2021, yaitu menyajikan hasil pemeriksaan strategis atas agenda pembangunan dalam bab dan sub bab tersendiri sudah cukup memadai? Apakah ada perbaikan yang diperlukan?</p> <p>e. Bagaimanakah penilaian yang tepat dari auditor eksternal pemerintah terhadap kinerja pemerintah? Apakah cukup dengan penyampaian rekomendasi</p>

No	Key Informan	Daftar Pertanyaan Utama
		<p>perbaikan atau perlu semacam kesimpulan atas hasil pemeriksaan terhadap satu prioritas nasional tertentu?</p> <p>f. Apakah Anda sebagai IAI memiliki pengetahuan mengenai model penyajian hasil pemeriksaan Supreme Audit Institutions (SAI) di negara lain terkait dengan ikhtisar hasil pemeriksaan yang merupakan evaluasi dari kinerja pemerintah?</p>
5.	BPK (pokja pemeriksaan prioritas nasional/pelaksana pemeriksaan tematik nasional)	<p>a. Cakupan pemeriksaan di BPK untuk pemeriksaan pada satu agenda pembangunan/prioritas nasional terbatas, menurut Anda sebagai sebagai tim pokja pemeriksaan Prioritas Nasional (PN), apakah ini akan berpengaruh kepada penilaian dan penyajian hasil pemeriksaan BPK terhadap agenda pembangunan pemerintah?</p> <p>b. Dengan terbatasnya cakupan pemeriksaan dan keterbatasan yang dimiliki BPK dalam melakukan pemeriksaan strategis agenda pembangunan nasional, apakah Anda sebagai tim pokja memiliki solusi bagaimana menyajikannya supaya pemerintah (secara makro dan mikro) dalam hal ini selaku pengambil kebijakan, dapat memahami dan melakukan perbaikan atas program/kegiatan PN yang dijalankan saat ini?</p> <p>c. Menurut Anda sebagai tim pokja pemeriksaan Prioritas Nasional (PN), apakah juklak dan juknis pemeriksaan kinerja maupun kepatuhan-DTT cukup untuk menjadi kriteria penilaian atas agenda pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah? Atau ada kriteria lain yang penting untuk ditambahkan?</p> <p>d. Apakah Anda sebagai tim pokja pemeriksaan strategis merasa sudah cukup puas dengan penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan strategis yang saat ini ada di BPK? Adakah alternatif yang ditawarkan supaya hasil-hasil pemeriksaan strategis atas agenda pembangunan nasional dirasakan cukup memadai dan berdampak?</p> <p>e. Hal-hal apa saja/di bagian mana yang perlu perbaikan (mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan di dalam IHPS)?</p> <p>f. Apa masukan Anda untuk model penyajian hasil pemeriksaan agenda pemerintah/prioritas nasional yang saat ini belum ada format bakunya di BPK?</p>

No	Key Informan	Daftar Pertanyaan Utama
		<p>Bagaimana alurnya mulai dari tahap awal pemeriksaan?</p> <p>g. Menurut Anda apakah dengan model penyajian tersebut cukup efektif untuk menyampaikan evaluasi BPK atas pelaksanaan agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah?</p> <p>h. Dari beberapa kemungkinan penyajian yang bisa disampaikan oleh BPK, menurut Anda sebagai tim pokja yang saat ini sedang bekerja di lapangan, alternatif mana yang paling pas dan strategis untuk BPK?</p> <p>i. Bagaimana memonitor pemilihan kebijakan penyajian hasil pemeriksaan strategis supaya berjalan optimal? Bagaimana teknisnya?</p>
6.	BPK (sentra koordinasi/coordinat or pemeriksaan PN)	<p>a. Sebagai bagian dari sentra koordinasi yang turut serta dalam merencanakan kebijakan pemeriksaan di BPK, apa tujuan dari dikeluarkannya kebijakan pemeriksaan strategis yang menilai/memeriksa pelaksanaan agenda pembangunan pemerintah saat ini?</p> <p>b. Tujuan apa yang ingin dicapai oleh BPK dalam hal ini dengan melaksanakan kebijakan pemeriksaan strategis menilai prioritas nasional dalam agenda pembangunan pemerintah?</p> <p>c. BPK telah melaksanakan pemeriksaan agenda pembangunan pemerintah pada PN 1 dan PN 3 di Tahun 2021. Apakah penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan strategis tersebut telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai?</p> <p>d. Cakupan pemeriksaan di BPK untuk pemeriksaan pada satu agenda pembangunan/prioritas nasional terbatas dalam hal sumber daya, baik anggaran maupun SDM. Apakah Sentra Koordinasi telah memitigasi kondisi ini?</p> <p>e. Apakah menurut tim sentra koordinasi, hasil evaluasi atas penyajian hasil pemeriksaan strategis di tahun 2021 telah cukup berdampak terhadap perbaikan kinerja pemerintah?</p> <p>f. Berdasarkan evaluasi/ lesson learnt terhadap pelaksanaan dan penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan atas PN 1 dan PN 3 tersebut, apa saja yang harus diperbaiki oleh BPK agar dapat menghasilkan penilaian yang memadai dan berdampak?</p>

No	Key Informan	Daftar Pertanyaan Utama
		<p>g. Sebenarnya output seperti apa yang diharapkan oleh Sentra Koordinasi/PSMK atas implementasi kebijakan pemeriksaan pada Renstra BPK 2020 – 2024?</p> <p>h. Apakah sampai dengan saat ini implementasi serta outputnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan?</p> <p>i. Menurut tim sentra koordinasi, model penyajian seperti apa yang paling tepat?</p> <p>j. Menurut Anda apakah dengan model penyajian tersebut cukup efektif untuk menyampaikan evaluasi BPK atas pelaksanaan agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah?</p> <p>k. Dari beberapa kemungkinan penyajian yang bisa disampaikan oleh BPK, menurut Anda sebagai sentra koordinasi yang mengawal pelaksanaan pemeriksaan strategis di BPK dari awal sampai akhir, alternatif penyajian yang seperti apa yang dianggap paling pas dan strategis untuk BPK?</p> <p>l. Bagaimana memonitor pemilihan kebijakan penyajian hasil pemeriksaan strategis supaya berjalan optimal? Bagaimana teknisnya?</p>
7.	Pakar/ahli kebijakan publik	<p>a. Saat ini BPK melakukan pemeriksaan strategis yang fokusnya diselaraskan dengan agenda pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, bagaimana menurut Anda?</p> <p>b. Apa saja sebaiknya yang disampaikan oleh BPK terkait dengan hasil-hasil pemeriksaan atas pelaksanaan agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah?</p> <p>c. BPK memiliki keterbatasan dalam hal cakupan pemeriksaan untuk pemeriksaan pada satu agenda pembangunan/prioritas nasional terbatas dalam hal sumber daya, baik anggaran maupun SDM. Menurut Anda apakah kendala ini dapat menghambat kinerja BPK dalam melakukan penilaian terhadap agenda pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah?</p> <p>d. BPK juga membagi fokus penilaian dalam satu agenda prioritas nasional tersebut per tahun, meskipun pemeriksaan masih terus berjalan untuk beberapa satker. Menurut Anda apakah ini merupakan kendala bagi BPK dalam menilai agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah?</p>

No	Key Informan	Daftar Pertanyaan Utama
		<p>e. Apakah posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga audit eksternal pemerintah cukup strategis dalam memfokuskan pemeriksaan pada agenda pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini?</p> <p>f. Untuk menyampaikan hasil pemeriksaan BPK sebagai satu kesatuan yang utuh atas satu agenda pembangunan pemerintah dengan istilah prioritas nasional, BPK membuat ikhtisar hasil pemeriksaan prioritas nasional tertentu. Menurut Anda, bagaimanakah model penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan yang tepat sebagai masukan perbaikan bagi pelaksanaan agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah?</p> <p>g. Dengan model penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan strategis yang saat ini dibuat oleh BPK, perbaikan apa yang diperlukan menurut Anda?</p> <p>h. Bagaimanakah penilaian yang tepat dari auditor eksternal pemerintah terhadap kinerja pemerintah? Apakah cukup dengan penyampaian rekomendasi perbaikan atau perlu semacam kesimpulan atas hasil pemeriksaan terhadap satu prioritas nasional tertentu?</p> <p>i. Apa masukan Anda terhadap model penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan strategis di BPK yang menilai/memeriksa kinerja pemerintah pada agenda pembangunan pemerintah?</p> <p>j. Apa masukan Anda terhadap model penyajian ikhtisar hasil pemeriksaan strategis di BPK yang menilai/memeriksa kinerja pemerintah pada agenda pembangunan pemerintah?</p> <p>k. Menurut Anda adakah model penyajian yang lebih mudah dipahami, lebih memadai, dan lebih berdampak terhadap pemerintah?</p> <p>l. Alternatif mana yang menurut Anda lebih tepat disampaikan oleh BPK sebagai auditor eksternal pemerintah?</p> <p>m. Bagaimana memonitor pemilihan kebijakan penyajian hasil pemeriksaan strategis supaya berjalan optimal? Bagaimana teknisnya?</p>

Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik
STIA LAN Jakarta



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996
Email : politeknik@stialan.ac.id, website : www.stialan.ac.id

Nomor : 2172/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 12 Desember 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Eni Triana Yuliani
NPM : 2141021037
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan
Judul Tesis : Model Penyajian Agenda Pembangunan Nasional
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Tembusan :
1. Direktur;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Fax. (021) 5720909

SURAT KETERANGAN

No. 20/X.2.2/RISET-MHS/05/2023

Jakarta, 31 Mei 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiskus Heriyanto Harum S.Sos., M.Tr.A.P.
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
NIP : 198305102007081001

menerangkan bahwa mahasiswi Politeknik STIA LAN Jakarta berikut:

Nama : Eni Triana Yuliani
NPM : 2141021037

telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di unit kerja Auditorat Utama Investigasi (AUI), Auditorat Utama Keuangan Negara I (AKN I), Auditorat Utama Keuangan Negara IV (AKN IV), dan Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Renvaja PKN) pada bulan Januari s.d. Mei 2023, dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul "Model Penyajian Agenda Pembangunan Nasional Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga,

Fransiskus Heriyanto Harum S.Sos., M.Tr.A.P.
NIP. 198305102007081001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA UMUM

1. Nama : Eni Triana Yuliani S.Sos.
2. Tempat / Tgl. Lahir : Gunungkidul, 5 Juli 1982
3. Jenis Kelamin : Wanita
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Nikah
6. Tingkat Pendidikan : S1
7. Pangkat / TMT : Penata Tk. I (III/d) / 1 Oktober 2018
8. Instansi : BPK RI
9. Unit Kerja : Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, Seksi
Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja I
Perumahan Grand Pamulang Residence Blok L5, Jalan
10. Alamat : Sukamulya Raya, Bambu Apus, Pamulang, Tangerang
Selatan, Banten
11. No. HP : 08121587008
12. Email : enitrianayuliani@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No.	Jenis Pendidikan	Jurusan	Nama Lembaga	Tanggal Lulus	No Ijasah / Tgl Ijasah
1.	Sarjana	Ilmu Komunikasi	Universitas Sebelas Maret Surakarta	02/05/2006	097/R/J27.1.13/S1/2006 / 02/05/2006
2.	SLTA	IPS	SMU Negeri 1 Wonosari	12/06/2001	13 Mu 0483162 / 12/06/2001
3.	SLTP		SMP N 1 Playen	23/05/1998	13 DI 0030630 / 23/05/1998
4.	SD		SDN Karang Mojo I	29/05/1995	13 OA oa 0035438 / 29/05/1995